



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MOH. MAHFUD MD**

Jabatan : **Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan**

Pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Januari 2024

Menko Polhukam,

MOH. MAHFUD MD

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN**

Tahun Anggaran : 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Penanganan permasalahan bidang politik, hukum, dan keamanan dalam memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta pelayanan publik pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional	100%
Tata kelola Kemenko Polhukam yang baik	1. Nilai RB Kemenko Polhukam	80
	2. Nilai SAKIP Kemenko Polhukam	74
	3. Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam	WTP

Jumlah Anggaran: Rp320.415.853.000,-
(Tiga Ratus Dua Puluh Miliar Empat Ratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Jakarta, Januari 2024
Menko Polhukam,


MOH. MAHFUD MD

**DOKUMEN MANUAL PERJANJIAN KINERJA
MENKO POLHUKAM**

Sasaran Strategis	Penanganan permasalahan bidang politik, hukum, dan keamanan dalam memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
Definisi Sasaran Strategis	Penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam kebijakan bidang politik, hukum, dan keamanan dalam rangka memperkuat stabilitas polhukhankam serta melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dalam pelayanan publik sebagai tujuan akhir
Indikator Kinerja	Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta pelayanan publik pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional
Definisi	<p>Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta pelayanan publik pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional adalah persentase capaian kinerja dalam rangka mendukung pembangunan bidang politik, hukum, dan keamanan serta pelayanan publik pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dengan dokumen perencanaan nasional yang telah ditetapkan. Adapun capaian kinerja sesuai dokumen perencanaan nasional yang akan dikoordinasikan, disinkronisasikan, serta dilakukan pengendalian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Demokrasi Indonesia Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia, yang dalam RKP 2024, telah dicantumkan sebagai salah satu target pada kegiatan yang mendukung program Prioritas Nasional ke-7. Pada IDI Metode Baru yang mulai diterapkan pada TA 2022, tingkat capaiannya diukur berdasarkan kinerja 3 Aspek dan 22 Indikator. Aspek-aspek tersebut yakni Kebebasan (terdiri dari 7 indikator), Kesetaraan (terdiri dari 7 indikator), dan Kapasitas Lembaga Demokrasi (terdiri dari 8 indikator). Hasil pengukuran IDI disampaikan dalam bentuk angka dengan rentang 0 s.d 100. Merujuk pada Perpres Nomor 52 Tahun 2023

	<p>tentang RKP, target IDI 2023 yang diukur pada TA 2024 sebesar 79,25.</p> <p>2. Indeks Citra Indonesia di Mata Dunia Internasional Citra Indonesia di mata dunia internasional adalah persepsi yang dipercayai/diyakini <i>stakeholder</i> eksternal terhadap Indonesia yang didasarkan kepada pola perilaku yang ditunjukkan Indonesia dalam pergaulan Internasional. Pola perilaku tersebut terbangun berdasarkan <i>power</i> yang dimiliki baik yang bersifat <i>hard</i> maupun <i>soft</i>. Citra dalam hal ini dapat bersifat positif dan negatif. Target Indeks Citra Indonesia di Mata Dunia Internasional tahun 2024 adalah sebesar 3,95.</p> <p>3. Indeks Perilaku Anti Korupsi Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) adalah metode pengukuran tingkat permisifitas masyarakat terhadap perilaku anti korupsi melalui survei perilaku anti korupsi yang dilaksanakan setiap tahun sejak tahun 2012 (kecuali tahun 2016). Target Indeks Perilaku Anti Korupsi tahun 2024 adalah sebesar 4,14.</p> <p>4. Terpenuhinya Kekuatan Pokok <i>Minimum Essential Force</i> (MEF) Kekuatan Pokok Minimum TNI (<i>Minimum Essential Force/MEF</i>) adalah suatu standar kekuatan pokok dan minimum yang merupakan bagian dari postur TNI secara utuh dan mutlak untuk disiapkan sebagai prasyarat utama serta mendasar bagi terlaksananya tugas pokok dan fungsi TNI secara efektif dalam menghadapi ancaman aktual serta tercapainya efek tangkal yang tinggi. Target Nasional MEF tahun 2024 adalah sebesar 100%.</p> <p>5. Tingkat Kriminalitas Tingkat kriminalitas (<i>crime rate</i>) merupakan indikator yang merepresentasikan tingkat keamanan di Indonesia yang diukur melalui kuantitas kelompok atau komunitas yang melakukan pelanggaran hukum atau pelanggaran pidana sehingga memengaruhi keseimbangan masyarakat.</p>
--	---

	<p>Target tingkat kriminalitas (<i>crime rate</i>) per 100.000 penduduk tahun 2024 adalah sebanyak 111 orang per 100.000 penduduk.</p> <p>6. Skor <i>Global Cybersecurity Index</i> <i>Global Cybersecurity Index</i> (GCI) adalah indeks yang mengukur komitmen negara anggota <i>International Telecommunication Union</i> (ITU) terhadap peningkatan kesadaran keamanan siber. GCI membahas seputar <i>Global Cybersecurity Agenda</i> dari ITU dengan 5 (lima) pilar yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Legal</i> (hukum) b. <i>Technical</i> (teknis) c. <i>Organizational</i> (organisasi) d. <i>Capacity Building</i> (pengembangan kapasitas) e. <i>Cooperation</i> (kerja sama) <p>Target skor <i>Global Cybersecurity Index</i> (GCI) tahun 2024 adalah sebesar 90,04.</p> <p>7. Persentase (%) Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik ke Atas Reformasi Birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama yang menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (<i>business process</i>), dan sumber daya manusia aparatur. Target persentase (%) Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik ke Atas antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kementerian/Lembaga : 80% 2) Provinsi : 71% 3) Kab/Kota : 67%
Sumber Data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Pusat Statistik (BPS) 2. Kementerian Luar Negeri 3. Kementerian PPN/Bappenas 4. Kementerian Pertahanan 5. Polri 6. <i>International Telecommunication Union</i> (ITU) 7. Kementerian PAN RB
Cara Menghitung	$\sum = \frac{\text{Jumlah capaian target pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta pelayanan publik}}{\text{Target pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta pelayanan publik pada dokumen perencanaan nasional}} \times 100\%$
Sasaran Strategis	Tata kelola Kemenko Polhukam yang baik
Indikator Kinerja 1	Nilai Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam

Definisi	<p>Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 penilaian Reformasi Birokrasi (RB) pada K/L dilakukan pada dua dimensi yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - RB General yang memotret kemajuan reformasi birokrasi untuk penyelesaian permasalahan internal; dan - RB Tematik yang memotret upaya yang bersifat inovasi untuk penyelesaian permasalahan tata kelola pada tema-tema prioritas pembangunan.
Sumber Data	Nilai RB yang dikeluarkan oleh KemenPANRB sebagai Tim Penilai Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga
Cara Menghitung	Lembar Kerja Evaluasi Tim Penilai RB KemenPANRB
Indikator Kinerja 2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kemenko Polhukam (SAKIP)
Definisi	<p>Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian yang sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi Pemerintah.</p> <p>Komponen Penilaian Evaluasi SAKIP berdasarkan PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Kinerja <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia (6%) • Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>) (9%) • Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan (15%) 2. Pengukuran Kinerja <ul style="list-style-type: none"> • Pengukuran Kinerja telah dilakukan (6%)

	<ul style="list-style-type: none"> • Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan (9%) • Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i>, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien (15%) <p>3. Pelaporan Kinerja</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja (3%) • Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya (4,5%) • Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya (7,5%) <p>4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan (5%) • Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai (7,5%) • Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja (12,5%)
Sumber Data	Penilaian SAKIP Kemenko Polhukam dihasilkan oleh Kementerian PANRB
Cara Menghitung	Predikat penilaian SAKIP ialah 0 sampai 100, dengan tujuh kriteria yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. AA (>90-100) 2. A (>80-90) 3. BB (>70-80) 4. B (>60-70) 5. CC (>50-60) 6. C (>30-50) 7. D (0-30)
Indikator Kinerja 3	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam

Definisi	Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan Kementerian/Lembaga Pemerintah. Empat opini BPK, yaitu: WTP, WDP, <i>adverse</i> , dan <i>disclaimer</i> .
Sumber Data	Laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam
Cara Menghitung	Penilaian yang berasal dari BPK RI atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam

MENKO POLHUKAM



MOH. MAHFUD MD